

Analisis Pembiayaan Sektor Publik oleh Pemerintah dalam Meningkatkan Pelayanan Sosial Publik di Indonesia: Pendekatan Kualitatif

Putri Fania Ardianti¹, Annisa Dela Ramadhani², Ahmad Wahyudi Zein³

¹²³Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received May 05, 2025

Revised May 10, 2025

Accepted May 19, 2025

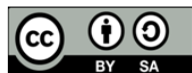
Available online May 20, 2025

Kata Kunci:

Pembiayaan publik, layanan publik, pengelolaan anggaran, tata kelola pemerintahan, pendekatan kualitatif.

Keywords:

Public financing, public services, budget management, governance, qualitative approach.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran strategis pembiayaan sektor publik oleh pemerintah dalam meningkatkan mutu pelayanan publik di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini menyoroti pemahaman yang mendalam melalui wawancara semi-terstruktur, studi literatur, serta analisis kebijakan yang relevan. Fokus utama kajian ini adalah bagaimana perencanaan, alokasi, dan pengelolaan anggaran publik dapat memengaruhi efektivitas layanan publik, baik dari sisi efisiensi administratif maupun kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pembiayaan sektor publik terhadap peningkatan layanan sangat ditentukan oleh sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik diterapkan dalam siklus penganggaran dan pelaksanaannya. Selain itu, koordinasi lintas sektor, kapabilitas aparatur pemerintah, serta keberadaan sistem pengawasan yang kuat turut menjadi determinan penting dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Temuan ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan

kebijakan fiskal yang berpihak pada pelayanan publik yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan perlunya reformasi tata kelola pembiayaan publik yang lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan dana publik.

ABSTRACT

This study aims to explore and analyze the strategic role of public sector financing by the government in improving the quality of public services in Indonesia. With a qualitative approach, this study targets an in-depth understanding through semi-structured interviews, literature studies, and relevant policy analysis. The main focus of this study is how public budget planning, allocation, and management can affect the effectiveness of public services, both in terms of administrative efficiency and public satisfaction as service recipients. The results of the study indicate that the influence of public sector financing on improving services is largely determined by the extent to which the principles of transparency, accountability, and public participation are applied in the budgeting cycle and its implementation. In addition, cross-sector coordination, government apparatus capabilities, and the existence of a strong monitoring system are also important determinants in ensuring the use of the budget on target. These findings provide theoretical and practical contributions to the development of fiscal policies that support inclusive, responsive, and sustainable public services. This study recommends the need for public financing governance reform that is more adaptive to community needs and increased institutional capacity in managing public funds.

PENDAHULUAN

Pembiayaan sektor publik merupakan unsur krusial dalam penyelenggaraan fungsi negara, khususnya dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Tahun 2023 mencatat total belanja pemerintah pusat sebesar Rp2,23 triliun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pelayanan umum menyerap anggaran terbesar, yakni sekitar Rp663 miliar. Sektor ekonomi memperoleh alokasi Rp630 miliar, diikuti oleh perlindungan sosial sebesar Rp241 miliar, dan pendidikan Rp230 miliar. Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk sektor ketertiban dan keamanan sebesar Rp175 miliar serta pertahanan sebesar Rp131 miliar.

Namun, pada tahun 2025, pemerintah mengumumkan pemangkasan anggaran sebesar Rp750 triliun. Kebijakan ini berdampak signifikan pada keberlangsungan berbagai layanan publik. Kementerian PUPR, misalnya, mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp60,4 triliun atau lebih dari setengah dari anggaran awal. Akibatnya, sejumlah proyek infrastruktur, termasuk pembangunan bendungan dan rehabilitasi sistem irigasi, harus dihentikan. Pemotongan anggaran juga dialami oleh Perpustakaan Nasional yang menyebabkan pengurangan drastis dalam program digitalisasi dan pembinaan perpustakaan. Badan Pusat Statistik tidak dapat melaksanakan beberapa survei penting, termasuk persiapan Sensus Ekonomi 2026. Sementara itu, BMKG mengalami kendala dalam operasional alat pemantauan akibat pemotongan anggaran sebesar Rp1 triliun lebih. Melalui pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa kebijakan efisiensi fiskal perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak mengorbankan layanan publik yang esensial. Meskipun efisiensi diperlukan untuk menjaga keseimbangan anggaran negara, pemotongan anggaran tanpa strategi yang tepat berpotensi menurunkan kualitas pelayanan dasar masyarakat.

Di luar besar kecilnya anggaran, efektivitas dalam perencanaan dan pelaksanaannya juga memegang peranan penting. Keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor pendukung utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran berbasis kinerja serta penerapan teknologi dan kemitraan sektor swasta menjadi strategi yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga kualitas layanan di tengah keterbatasan anggaran.

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas sebagai bagian dari mandat konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Pelayanan publik mencakup berbagai sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, administrasi kependudukan, dan infrastruktur, yang semuanya menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk mendukung penyediaan layanan tersebut, dibutuhkan sistem pembiayaan sektor publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, ketersediaan anggaran yang memadai dan pengelolaan keuangan negara yang baik merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi pelayanan publik.

Dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang yang menghadapi berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan politik, pembiayaan sektor publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai alat strategis dalam memperkuat fungsi pemerintahan dan menutup kesenjangan pembangunan antarwilayah. Pemerintah pusat maupun daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan mengeksekusi anggaran publik yang mampu menjawab permasalahan riil di masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering kali dijumpai berbagai persoalan seperti penyusunan anggaran yang kurang partisipatif, alokasi dana yang tidak tepat sasaran, birokrasi yang berbelit, serta lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi penggunaan dana publik. Kondisi ini menimbulkan ketidakefisienan dalam pelayanan publik dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Fenomena tersebut menunjukkan perlunya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana pembiayaan sektor publik dikelola oleh pemerintah, serta sejauh mana mekanisme pembiayaan tersebut berdampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik di Indonesia. Untuk menjawab persoalan tersebut, pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait proses, tantangan, serta strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola pembiayaan sektor publik. Melalui analisis terhadap dokumen kebijakan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta pengamatan pada praktik penyelenggaraan pelayanan di tingkat daerah, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pengembangan sistem pembiayaan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan memahami lebih jauh dinamika pembiayaan sektor publik, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang berbasis data dan pengalaman empirik guna memperbaiki tata kelola pembiayaan publik di masa depan. Pada akhirnya, harapannya adalah terciptanya

pelayanan publik yang lebih merata, efisien, dan berorientasi pada kepentingan warga negara sebagai bagian dari proses pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik menuntut pemerintah untuk tidak hanya meningkatkan anggaran, tetapi juga memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana publik. Meskipun alokasi anggaran sektor publik di Indonesia terus bertambah setiap tahunnya, masih banyak persoalan mendasar seperti ketimpangan layanan antarwilayah, rendahnya transparansi anggaran, serta lemahnya akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Ketidaksesuaian antara besarnya pembiayaan dan hasil yang diperoleh menunjukkan adanya celah dalam proses perencanaan, pengelolaan, dan evaluasi kebijakan fiskal.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana pembiayaan publik benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan layanan publik, terutama dari perspektif pelaksanaan di lapangan. Dengan pendekatan kualitatif, studi ini memberikan ruang untuk mengeksplorasi dinamika yang tidak tertangkap oleh data kuantitatif, seperti persepsi aktor kebijakan, hambatan struktural, serta konteks lokal yang memengaruhi efektivitas pembiayaan publik. Penelitian ini penting sebagai dasar pertimbangan dalam perbaikan strategi pembiayaan agar lebih tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai proses pembiayaan sektor publik oleh pemerintah serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait dalam konteks sosial dan kelembagaan yang kompleks. Melalui pendekatan ini, penelitian difokuskan pada eksplorasi realitas di lapangan yang tidak dapat dijelaskan secara numerik, melainkan melalui interpretasi terhadap data deskriptif yang diperoleh dari berbagai sumber.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara utama, yaitu wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi pejabat pemerintah pusat dan daerah yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengelolaan anggaran, akademisi yang memiliki keahlian di bidang kebijakan publik dan keuangan negara, serta perwakilan masyarakat atau LSM yang aktif dalam pengawasan kebijakan publik. Teknik purposive sampling digunakan untuk menentukan informan dengan kriteria relevan terhadap fokus penelitian.

Dokumen yang dianalisis dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan, laporan anggaran, kebijakan fiskal, serta dokumen evaluasi kinerja pelayanan publik dari lembaga pemerintah terkait. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana implementasi anggaran dalam pelayanan publik di tingkat daerah berjalan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi di lapangan.

Analisis data dilakukan secara tematik dengan menggunakan teknik coding, klasifikasi, dan interpretasi makna atas hasil wawancara dan dokumen yang telah dikumpulkan. Proses ini dimulai dengan transkripsi data, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi pola, kategori, serta tema-tema utama yang muncul dari data. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber dan metode, yakni membandingkan temuan dari wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk memperoleh kesimpulan yang konsisten dan dapat dipercaya.

Melalui metode ini, diharapkan penelitian mampu menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai dinamika pembiayaan sektor publik oleh pemerintah dan implikasinya terhadap penyediaan layanan publik di Indonesia, serta mengidentifikasi ruang-ruang perbaikan dalam praktik kebijakan anggaran publik yang lebih efektif dan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Sektor Publik Oleh Pemerintah

Pembiayaan sektor publik merupakan elemen vital dalam memastikan tercapainya fungsi-fungsi negara, khususnya dalam hal penyediaan layanan dasar kepada masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem pembiayaan ini terutama didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang keduanya bertujuan untuk mendanai berbagai program pembangunan serta operasionalisasi pelayanan publik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan nominal anggaran tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan. Perencanaan anggaran yang masih sering dilakukan secara top-down menjadi salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran dalam alokasi dana publik. Banyak program yang dijalankan tidak berangkat dari analisis kebutuhan masyarakat secara komprehensif, tetapi lebih didasarkan pada logika birokrasi dan pendekatan administratif yang kurang partisipatif.

Di sisi lain, terdapat ketimpangan dalam kapasitas fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, maupun antardaerah itu sendiri. Daerah yang memiliki potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang besar, seperti kota metropolitan dan wilayah dengan sumber daya alam melimpah, dapat mengalokasikan anggaran lebih luas dan fleksibel. Sebaliknya, daerah tertinggal atau perbatasan sangat bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana transfer lainnya dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam mengembangkan inovasi layanan, karena ruang fiskal yang sempit menyulitkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan lokal.

Implementasi anggaran juga menghadapi berbagai tantangan. Penyerapan anggaran yang tidak optimal masih menjadi persoalan kronis setiap tahunnya. Lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, serta lemahnya kapasitas manajerial dan teknis aparat pemerintah di berbagai daerah, menyebabkan dana publik tidak segera tersalurkan kepada sektor-sektor yang membutuhkan. Selain itu, prosedur birokrasi yang kaku sering kali menjadi penghambat tersendiri dalam percepatan belanja anggaran.

Pengawasan dan evaluasi anggaran publik pun belum maksimal. Kendati mekanisme audit dari lembaga negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan inspektorat telah berjalan, partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan anggaran masih minim. Hal ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas publik dalam penggunaan anggaran dan membuka peluang terjadinya inefisiensi atau bahkan penyimpangan dana.

Pelayanan Publik di Indonesia

Pelayanan publik merupakan manifestasi konkret dari tanggung jawab negara terhadap warganya. Kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat merupakan indikator penting dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun terdapat berbagai kebijakan dan program reformasi birokrasi, tantangan dalam pelayanan publik di Indonesia masih cukup kompleks dan beragam.

Salah satu isu utama dalam pelayanan publik adalah masih timpangnya kualitas dan jangkauan layanan antara pusat dan daerah. Sektor pendidikan, sebagai contoh, meskipun telah mendapat alokasi anggaran minimal 20% dari APBN/APBD, masih menghadapi persoalan kesenjangan mutu antarwilayah. Sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan guru berkualitas, fasilitas pendukung, dan akses terhadap teknologi pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang tersedia belum sepenuhnya disertai dengan strategi distribusi sumber daya yang merata.

Di bidang kesehatan, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, namun dari sisi pelayanan, masih terdapat kendala dalam hal ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, kekurangan tenaga medis, serta kualitas pelayanan yang kurang responsif terhadap kebutuhan pasien. Beberapa rumah sakit rujukan bahkan mengalami kesulitan operasional akibat mekanisme pembiayaan yang lamban atau tidak proporsional.

Pelayanan administrasi publik, terutama yang bersifat digital, menunjukkan kemajuan di beberapa daerah melalui implementasi e-government dan aplikasi layanan satu pintu. Namun,

transformasi digital ini belum menyentuh semua daerah, terutama wilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Di banyak daerah, masyarakat masih menghadapi kendala dalam mengakses layanan administrasi dasar, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan usaha, dan bantuan sosial.

Dari sisi pengguna layanan, partisipasi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan publik masih rendah. Mekanisme pengaduan yang tersedia belum sepenuhnya efektif dan responsif. Akibatnya, banyak keluhan tidak tertindaklanjuti, dan ini memperburuk persepsi publik terhadap kualitas pelayanan. Sebuah pelayanan yang tidak disertai dengan pendekatan humanis, transparan, dan akuntabel akan berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

Secara umum, tantangan utama dalam pelayanan publik di Indonesia tidak hanya terkait dengan ketersediaan sumber daya, tetapi juga dengan tata kelola yang belum optimal. Tanpa perbaikan dalam manajemen, transparansi, dan akuntabilitas, maka dana yang besar sekalipun tidak akan mampu menghasilkan layanan publik yang bermutu tinggi.

Keterkaitan Antara Pembiayaan Sektor Publik dan Pelayanan Publik

Keterkaitan antara pembiayaan sektor publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan relasi kausal yang saling melengkapi. Dalam konteks kebijakan publik, pembiayaan bukan sekadar alokasi dana, melainkan mencerminkan prioritas pembangunan dan komitmen pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, besaran, struktur, dan mekanisme pembiayaan akan sangat memengaruhi kualitas, aksesibilitas, dan pemerataan pelayanan yang diterima oleh masyarakat.

Pertama, dari segi kuantitas pembiayaan, semakin besar dana yang dialokasikan untuk sektor-sektor pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial, maka semakin terbuka peluang peningkatan kualitas layanan. Misalnya, peningkatan belanja negara untuk pendidikan dapat digunakan untuk pembangunan sarana belajar, peningkatan kualitas guru, serta distribusi bantuan pendidikan. Namun, besaran anggaran semata tidak menjamin kualitas pelayanan apabila tidak disertai dengan perencanaan berbasis data dan evaluasi kinerja yang konsisten.

Kedua, kualitas tata kelola keuangan publik menjadi faktor krusial dalam menentukan apakah pembiayaan yang telah disediakan dapat berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik. Tata kelola yang baik mencakup transparansi dalam proses penganggaran, akuntabilitas dalam pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif oleh lembaga pengawas maupun masyarakat. Sayangnya, beberapa studi menunjukkan bahwa kebocoran anggaran, tumpang tindih program, dan proyek yang tidak berkelanjutan masih banyak ditemukan di tingkat daerah, yang pada akhirnya menghambat perbaikan pelayanan.

Ketiga, mekanisme distribusi dan efektivitas penyerapan anggaran juga menentukan seberapa cepat dan tepat pelayanan publik dapat dinikmati oleh masyarakat. Daerah dengan serapan anggaran tinggi cenderung lebih mampu merealisasikan program pelayanan dengan hasil yang terukur. Sebaliknya, daerah yang terlambat dalam merancang dan melaksanakan program cenderung mengalami stagnasi dalam kualitas layanan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak hanya volume anggaran, tetapi juga kapasitas manajerial dan teknis di tingkat lokal sangat menentukan keberhasilan pelayanan.

Keempat, terdapat pula dimensi prioritas anggaran yang merefleksikan orientasi pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Apabila anggaran lebih banyak terserap untuk belanja aparatur dibanding belanja publik, maka pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat akan terabaikan. Oleh karena itu, pemisahan yang jelas antara belanja rutin dan belanja pembangunan harus terus diperkuat, terutama agar pembiayaan benar-benar mengarah pada peningkatan outcome pelayanan.

Kelima, dalam konteks pelayanan yang inklusif dan berkeadilan, pembiayaan publik harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan kelompok masyarakat. Pemerintah perlu mempertimbangkan variabel geografis, demografis, dan sosial ekonomi dalam merancang kebijakan anggaran. Daerah-daerah terpencil yang memiliki hambatan fisik dan sumber daya tentu memerlukan afirmasi anggaran yang lebih besar agar dapat mengejar ketertinggalan dalam pelayanan.

Keenam, penguatan kolaborasi multipihak menjadi pendekatan penting dalam mengoptimalkan pembiayaan dan pelayanan. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kemitraan strategis dengan sektor swasta, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil dapat memperluas cakupan dan efektivitas layanan. Dalam hal ini, model pembiayaan alternatif seperti skema Public-Private Partnership (PPP) dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran negara dalam menyediakan layanan publik secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hubungan antara pembiayaan dan pelayanan publik sangat erat dan bersifat interdependen. Pembiayaan yang efektif harus didesain sebagai instrumen untuk mencapai outcome pelayanan yang optimal, bukan sekadar pemenuhan prosedur anggaran. Dengan manajemen pembiayaan yang baik, partisipatif, dan berkelanjutan, maka kualitas pelayanan publik yang responsif, merata, dan berkeadilan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan di Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sektor publik oleh pemerintah memainkan peran krusial dalam menentukan mutu dan efektivitas pelayanan publik di Indonesia. Dukungan anggaran yang mencukupi, apabila dikelola dengan prinsip tata kelola yang baik, mampu mendorong peningkatan akses, mutu, dan keberlanjutan layanan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta layanan administrasi pemerintahan. Pendanaan publik yang optimal menjadi fondasi utama dalam memperkuat kapasitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Namun demikian, implementasi kebijakan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan dana belum selalu diiringi oleh pengelolaan yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tantangan seperti ketimpangan fiskal antarwilayah, rendahnya efektivitas penyerapan anggaran, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya pelibatan publik dalam proses pengawasan, masih menjadi hambatan struktural yang signifikan. Selain itu, kecenderungan alokasi anggaran yang lebih besar untuk belanja aparatur dibandingkan kebutuhan layanan publik menambah kompleksitas permasalahan ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam strategi pembiayaan yang menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, disertai penguatan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil juga perlu diperkuat agar penyediaan layanan publik tidak sepenuhnya bergantung pada kapasitas fiskal pemerintah, tetapi dapat didukung oleh kemitraan yang sinergis dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Nasution, J. (2025). *Ekonomi Publik*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Yuliani, E. (2021). *Analisis Efektivitas Pembiayaan Publik dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Publik. 15(2). 123-135.
- Rahmawati, L. (2023). *Studi Kualitatif tentang Hubungan antara Pembiayaan Publik dan Kinerja Pelayanan Publik di Indonesia*. Jurnal Administrasi Negara. 18(3). 200-215.
- Taras, T. dan Artini, L.G.S (n.d.). *Analisis Pendapatan Hasil Daerah (PAD) dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Badung Bali*. E-Jurnal Manajemen Unud. 6(5).2360-2387.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). *Statistik Keuangan Daerah 2023*. Jakarta: BPS.
- Siregar, H. dan Nugroho, D. (2022). *Pengaruh Alokasi Anggaran Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Daerah*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. 10(1). 45-60.
- OECD. (2022). *Indonesian Economic Outlook 2022: Strengthening Public Sector Efficiency*. Paris: OECD Publishing.
- Halim, A. (2021). *Manajemen Keuangan Sektor Publik: Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah*. UII Press.
- Bastian, I. (2021). *Manajemen Keuangan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Simarmata, Y. N. (2022). *Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Prinsip Good Governance di Kantor Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi*. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik. 4(2). 38-47.
- Handika, N. B. dan Rostyaningsih, D. (2020). *Analisis Kualitas Pelayanan Publlik (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Kabupaten kudus*.
- Martadinata, S. (2024). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Jurnal Inovasi Global. ISSN: 3032-2723. Doi: <https://doi.org/10.58344/jig.v2i6>
- Jalak, A. Mindarti, I. L. dan Nurani, F. (2023). *Analisis Kualitas Pelayanan Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Yakuhimo*. Jurnal Administrasi Publik. 6(3). 111-122.